

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



IPM  
KOTA PALU  
2019



Umur Panjang  
dan  
Hidup Sehat



Pengetahuan



Standar  
Hidup Layak



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA PALU**

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



**IPM**  
**KOTA PALU**  
**2019**



Umur Panjang  
dan  
Hidup Sehat



Pengetahuan



Standar  
Hidup Layak

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU TAHUN 2019**

<b>ISSN</b>	<b>: -</b>
<b>Nomor Publikasi</b>	<b>: 72710.2016</b>
<b>Nomor Katalog</b>	<b>: 4102002.7271</b>
<b>Ukuran Buku</b>	<b>: 17,6x 25 cm</b>
<b>Jumlah Halaman</b>	<b>: x + 52 halaman</b>

Naskah :  
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Penyunting :  
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Gambar Kulit :  
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Sumber Ilustrasi :  
[https://www.freepik.com/free-vector/geometric-business-brochure\\_1207303.htm#page=1&query=geometric-business-brochure&position=41](https://www.freepik.com/free-vector/geometric-business-brochure_1207303.htm#page=1&query=geometric-business-brochure&position=41)  
<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pendidikan-fokus-utama-pemerintah-dengan-alokasi-20-dari-apbn/>

Diterbitkan Oleh :  
© Badan Pusat Statistik Kota Palu

Dicetak Oleh :  
Badan Pusat Statistik Kota Palu

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

# **INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU TAHUN 2019**

## **TIM PENYUSUN**

Penanggungjawab Umum:  
G.A. Nasser, S.E, M.M.

Penyunting:  
Muhammad Ikbal, S.Si

Penulis:  
Nurtiana Prahestin, S.Tr.Stat.

Gambar Sampul:  
Nurtiana Prahestin, S.Tr.Stat.

<https://palukota.pps.go.id>





## KATA PENGANTAR

Publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu Tahun 2019 ini merupakan publikasi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palu. Secara garis besar publikasi ini memberikan gambaran umum mengenai kondisi capaian pembangunan manusia di Kota Palu tahun 2015-2019.

Adapun data dan informasi yang disajikan terdiri dari hasil penghitungan besaran IPM, nilai indeks komponen-komponen penyusun IPM, pertumbuhan dan status IPM, disparitas IPM antarwilayah di provinsi Sulawesi Tengah, dan kaitan IPM dengan indikator kemiskinan. Adapun indikator kemiskinan yang dimaksud adalah persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, keparahan kemiskinan, dan kedalaman kemiskinan.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini, kami mengucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan guna perbaikan pada masa mendatang.

Akhirnya, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukannya.

Palu, Oktober 2020

Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palu

G.A. Nasser, S.E, M.M.



## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>Daftar Tabel.....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Gambar .....</b>	<b>ix</b>
<b>Daftar Lampiran .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>3</b>
1.1. Latar Belakang .....	3
1.2. Tujuan Penulisan.....	5
1.3. Sistematika Penulisan.....	6
<b>BAB II METODOLOGI.....</b>	<b>11</b>
2.1. Definisi IPM.....	11
2.2. Sumber Data IPM .....	14
2.3. Komponen IPM .....	15
2.4. Kecepatan IPM .....	19
2.5. Status IPM.....	20
2.6. Manfaat IPM.....	20
<b>BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU .....</b>	<b>23</b>
3.1. Indeks Pembangunan Manusia .....	23
3.2. Dimensi Kesehatan Kota Palu.....	25
3.3. Dimensi Pendidikan Kota Palu .....	26

3.4. Dimensi Standar Hidup Kota Palu.....28

3.5. IPM Antarwilayah Di Sulawesi Tengah .....29

**BAB IV KAITAN IPM DENGAN INDIKATOR KEMISKINAN ..... 33**

**BAB V PENUTUP ..... 41**

**DAFTAR PUSTAKA..... 45**

**LAMPIRAN ..... 49**

<https://palukota.bps.go.id>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM.....	15
Tabel 2.	Status IPM Kota Palu Tahun 2015-2019.....	25
Tabel 3.	Korelasi IPM dengan Indikator Kemiskinan.....	37

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Perbandingan IPM Metode Lama dan Baru.....	13
Gambar 2.	IPM Sebagai Gambaran Outcome dari Kebijakan Pemerintah	14
Gambar 3.	IPM Kota Palu Tahun 2015-2019.....	23
Gambar 4.	Kecepatan IPM Kota Palu Tahun 2015-2019.....	24
Gambar 5.	Angka Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2015-2019.....	25
Gambar 6.	Harapan Lama Sekolah Kota Palu Tahun 2015-2019.....	27
Gambar 7.	Rata-rata Lama Sekolah Kota Palu Tahun 2015-2019.....	28
Gambar 8.	Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Kota Palu Tahun 2015-2019.....	29
Gambar 9.	Perbandingan IPM Antarwilayah Di Sulawesi Tengah.....	30
Gambar 10.	Persentase Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2015-2019.....	33
Gambar 11.	Jumlah Penduduk Miskin Kota Palu 2015-2019.....	34
Gambar 12.	Kedalaman Kemiskinan Kota Palu Tahun 2015-2019.....	35
Gambar 13.	Keparahan Kemiskinan Kota Palu Tahun 2015-2019.....	36

## DAFTAR LAMPIRAN

Infografis .....	49
Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019.....	51
Lampiran 2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019 .....	52

<https://palukota.bps.go.id>



# BAB I

<https://palingbaikbps.go.id>



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

#### Indeks Pembangunan Manusia

Sebelum tahun 1990, pembangunan manusia masih belum menjadi prioritas di berbagai negara di dunia. Negara hanya mementingkan pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi. Saat itu manusia dianggap sebagai input atau subjek pembangunan. Manusia dianggap sebagai alat pembangunan suatu negara sehingga manusia hanya dimanfaatkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tanpa mempedulikan kondisi manusia itu sendiri.

Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi menjadi ukuran utama yang sangat penting dalam pembangunan sebelum tahun 1990. Namun, kedua indikator tersebut belum menjelaskan fakta bahwa tujuan utama pembangunan adalah untuk memberi manfaat bagi masyarakat. Pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi yang dicapai perlu dirasakan oleh seluruh masyarakat demi meningkatkan kesejahteraannya. Hal tersebut dapat dilihat melalui pendapatan perkapita masyarakat, akses terhadap pendidikan, serta akses terhadap kesehatan. Ketiga hal tersebut harus dirasakan oleh seluruh masyarakat, tanpa ada gap yang terlalu jauh untuk bisa menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat sudah merata.

Pada tahun 1990, *United Nation Development Programme* (UNDP) mengeluarkan sebuah indeks komposit yang mengukur perkembangan manusia, yaitu *Human Development Index* (HDI) yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dunia internasional mulai menyadari bahwa manusia merupakan input sekaligus menjadi tujuan dalam pembangunan. Manusia bukan hanya subjek pembangunan melainkan objek pembangunan yang harus juga ditingkatkan kualitasnya. Sehingga keberhasilan suatu negara tidak lagi hanya dilihat

Seberapa pertumbuhannya ekonominya namun juga harus melihat bagaimana pembangunan manusianya. Pembangunan manusia yang baik akan melahirkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Hal tersebut tentunya akan mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara ke arah lebih baik.

HDI dibuat untuk menekankan bahwa manusia dan kemampuannya harus menjadi kriteria utama untuk menilai perkembangan suatu negara, bukan pertumbuhan ekonomi saja. Sehingga suatu negara perlu menerapkan kebijakan yang seimbang terkait dengan perekonomian dan pembangunan manusia. Kedua hal tersebut berjalan beriringan dan saling terkait satu sama lain. Tanpa perekonomian yang baik, maka suatu negara akan kesulitan dalam membangun manusia. Begitu juga dengan manusia yang kurang berkualitas, suatu negara akan kesulitan dalam membangun perekonomiannya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 pemerintah memiliki tema dan agenda pembangunan yaitu "Indonesia Berpenghasilan Menengah - Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan". Dalam RPJMN tersebut terdapat 7 agenda pembangunan diantaranya yaitu Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan; dan Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing yang Berkualitas.

Dalam mewujudkan rencana pembangunan tersebut terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi. Pertama yaitu adalah Pertumbuhan ekonomi yang stagnan. Selepas krisis ekonomi 1998, rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya pada kisaran 5,3 persen per tahun. Bahkan dalam empat tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung stagnan pada kisaran 5,0 persen. Dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tersebut, sulit bagi Indonesia untuk dapat naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi atau mengejar ketertinggalan pendapatan per kapita negara peers.

Stagnannya pertumbuhan ekonomi disebabkan utamanya oleh tingkat produktivitas yang rendah seiring tidak berjalannya transformasi struktural. Salah satu faktornya adalah rendahnya kualitas SDM dan produktivitas tenaga kerja.

Tantangan kedua yaitu Revolusi Industri 4.0 dan Ekonomi Digital. Saat ini dunia telah memasuki era revolusi industry 4.0. Revolusi tersebut memberikan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian ke depan. Revolusi industry menyebabkan hilangnya beberapa pekerjaan karena digantikan dengan teknologi, sehingga diperlukan kemampuan agar bisa bertahan di dalam perekonomian.

Dalam RPJMN juga dijelaskan Sasaran Ekonomi Makro 2020-2024. Salah satu sasaran yang ingin di capai adalah sasaran makro pembangunan. Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkat rata-rata 5,4 – 6,03 persen per tahun dan pertumbuhan PDB per kapita sebesar 4,0 +/- 1 persen, yang didorong oleh peningkatan produktivitas, investasi yang berkelanjutan, perbaikan pasar tenaga kerja, dan peningkatan kualitas SDM. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, Tingkat kemiskinan diharapkan menurun menjadi 6,5 – 7,0 persen pada tahun 2024. Sementara IPM diharapkan meningkat menjadi 75,54 pada tahun 2024, yang mengindikasikan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

### **1.2. Tujuan Penulisan**

Dalam buku publikasi ini disajikan data dan analisis indeks pembangunan manusia di Kota Palu tahun 2015-2019 secara umum. Buku publikasi ini disusun untuk melihat perkembangan, keterbandingan antar waktu serta wilayah, serta kaitan IPM dengan indikator sosial ekonomi. Secara lebih rinci tujuan penulisan buku publikasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

1. Mengetahui perkembangan dan posisi Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palu selama tahun 2015-2019;
2. Memberikan gambaran komponen pembentukan Indeks Pembangunan Manusia di Kota Palu selama tahun 2015-2019;
3. Melihat keterbandingan Indeks Pembangunan Manusia antar waktu serta wilayah selama tahun 2015-2019 di Provinsi Sulawesi Tengah;
4. Menganalisa keterkaitan Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu dengan indikator kemiskinan.

### 1.3. Sistematika Penulisan

#### BAB I Pendahuluan

Pada bab pertama ini yaitu pendahuluan berisi latar belakang, tujuan penulisan, dan sistematika penulisan. Pada Latar belakang akan menguraikan gambaran awal mengenai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sedangkan pada subbab tujuan penulisan akan menguraikan tujuan dari penulisan buku publikasi Indeks Pembangunan Manusia 2019 ini. Subbab terakhir adalah sistematika penulisan yang menguraikan garis besar dari bab dan subbab yang dibahas dalam buku publikasi ini.

#### BAB II Metodologi

Bab kedua ini terdiri dari 6 subbab yaitu definisi IPM, sumber data IPM, komponen IPM, kecepatan IPM, status IPM, dan manfaat IPM. Definisi IPM akan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan IPM. Sedangkan sumber data IPM akan menguraikan sumber data-data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Subbab komponen IPM akan menguraikan komponen-komponen dan indikator-indikator yang

digunakan sebagai pembentuk IPM. Subbab kecepatan IPM akan membahas penghitungan kecepatan IPM. Pada Subbab status IPM akan menguraikan klasifikasi IPM berdasarkan nilainya. Dan yang terakhir subbab manfaat IPM akan menjelaskan manfaat atau fungsi dari IPM itu sendiri.

### **BAB III Pembangunan Manusia Kota Palu**

Pada bab ketiga ini akan terdiri dari lima subbab. Subbab pertama yaitu pembangunan manusia Kota Palu yang akan menguraikan tentang perkembangan IPM di Kota Palu selama tahun 2015-2019, kecepatan IPM dan status IPM. Subbab kedua yaitu dimensi kesehatan Kota Palu akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi kesehatan di Kota Palu selama tahun 2015-2019. Sedangkan subbab ketiga yaitu dimensi pendidikan Kota Palu akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi pendidikan di Kota Palu selama tahun 2015-2019. Dan yang keempat yaitu subbab dimensi standar hidup Kota Palu yang akan menjelaskan perkembangan indikator pada dimensi standar hidup di Kota Palu selama tahun 2015-2019. Subbab terakhir adalah IPM antar wilayah di Sulawesi Tengah yang akan menguraikan perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

### **BAB IV Kaitan IPM dengan Indikator Kemiskinan**

Sedangkan pada bab kelima akan menganalisa keterkaitan IPM dengan indikator kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin, jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan.

### **BAB V Penutup**

Pada bab kelima ini akan menjelaskan mengenai kesimpulan dari publikasi. Kesimpulan ini berdasarkan pada tujuan penelitian yang terdapat dalam bab I. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab tujuan penulisan buku publikasi.







## BAB II METODOLOGI

### 2.1. Definisi IPM

#### Apa Itu Indeks Pembangunan Manusia?

IPM (Indeks Pembangunan Manusia) merupakan indeks komposit yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).

Pada awal UNDP memperkenalkan HDI, HDI dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan angka melek huruf dewasa, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PDB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata aritmatik.

Pada tahun-tahun berikutnya UNDP terus melakukan perbaikan pada penghitungan HDI. Setelah melakukan kajian, ternyata indikator dan metode penghitungan yang digunakan pada HDI kurang dapat menggambarkan pembangunan manusia yang sesungguhnya sehingga perlu dilakukan perubahan. Perubahan yang dilakukan UNDP dilakukan beberapa kali, yaitu pada tahun 1991, 1995, 2010, 2011, dan 2014.

Setelah melakukan banyak perubahan, saat ini HDI dihitung melalui pendekatan dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan angka harapan hidup saat lahir, dimensi pengetahuan yang diproksi dengan harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, serta dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PNB per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi sebuah indeks komposit, digunakan rata-rata geometrik

dan dengan tahun dasar 2005. Beberapa perubahan yang dilakukan UNDP tersebut bertujuan agar dapat membuat suatu indeks komposit yang cukup relevan dalam mengukur pembangunan manusia.

IPM dihitung dengan rata-rata geometrik

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}}$$

### Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi penghitungan IPM.

#### PERTAMA

- Beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Angka melek huruf sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu, karena angka melek huruf di sebagian besar daerah sudah tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik.
- PDB per kapita tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

#### KEDUA

Penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain.

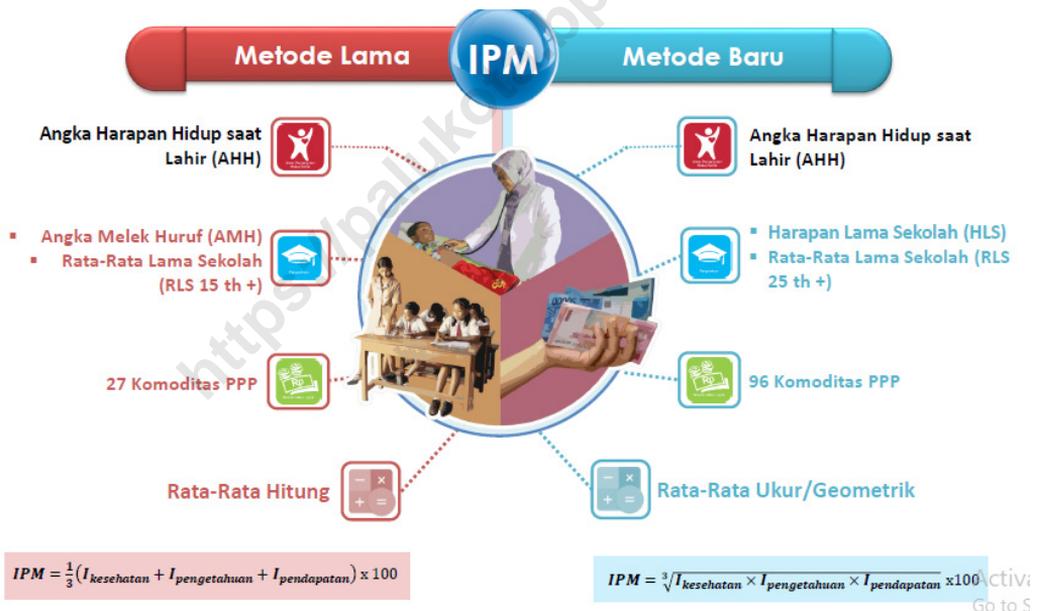
IPM dengan metode baru memiliki keunggulan dibandingkan dengan metode yang sebelumnya.

**Pertama** yaitu dengan menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik (diskriminatif).

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

**Kedua** dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.



Gambar 1. Perbandingan IPM Metode Lama dan Baru

IPM merupakan indikator jangka panjang sehingga perlu kehati-hatian dalam memaknainya. Peringkat (ranking) dari IPM bukan satu-satunya ukuran kemajuan pembangunan manusia.

### Kemajuan pembangunan manusia dapat dilihat dari:

- Kecepatan IPM

Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode.

- Status IPM

Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode.

IPM memotret pembangunan manusia di Level *outcome/impact* yang dihasilkan oleh input dan proses dari berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Sehingga untuk dapat meningkatkan IPM perlu dilakukan intervensi di level input dan proses. Dengan kata lain, IPM tidak dapat ditingkatkan secara langsung, akan tetapi dengan memperbaiki input dan proses yang nantinya akan meningkatkan IPM secara tidak langsung.



Gambar 2. IPM Sebagai Gambaran *Outcome* dari Kebijakan Pemerintah

### 2.2. Sumber Data IPM

Indonesia menerapkan penghitungan IPM dengan metode baru sesuai dengan UNDP. Namun Indonesia melakukan penyesuaian terhadap metode baru tersebut. Penyesuaian ini dilakukan pada indikator PNB per kapita karena tidak tersedianya data. Dari empat indikator yang digunakan dalam penghitungan IPM metode baru, tiga diantaranya sama persis dengan yang

digunakan UNDP. Khusus untuk PNB per kapita, indikator ini diproksi dengan Pengeluaran per kapita. Berikut ini sumber data yang digunakan untuk menghitung IPM dengan metode baru :

- Angka harapan hidup saat lahir (Sensus Penduduk 2010, Proyeksi Penduduk 2010-2035)
- Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah (Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS)
- PNB per kapita tidak tersedia pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga diproksi dengan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data SUSENAS.

### 2.3. Komponen IPM

#### Menghitung Indeks Komponen

Setiap komponen IPM distandardisasi dengan nilai minimum dan maksimum sebelum digunakan untuk menghitung IPM.

Tabel 1. Penentuan Nilai Minimum dan Maksimum Indikator IPM

Indikator	Satuan	UNDP		BPS	
		Min	Max	Min	Max
Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH)	Tahun	20	85	20	85
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	0	18	0	18
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	0	15	0	15
Pengeluaran per Kapita Disesuaikan		100 (PPP U\$)	107.721 (PPP U\$)	1.007.436* (Rp)	26.572.352** (Rp)

Batas maksimum minimum mengacu pada UNDP kecuali indikator daya beli.

Keterangan:

- Daya beli minimum merupakan garis kemiskinan terendah kabupaten tahun 2010 (data empiris) yaitu di Tolikara-Papua
- Daya beli maksimum merupakan nilai tertinggi kabupaten yang diproyeksikan hingga 2025 (akhir RPJPN) yaitu perkiraan pengeluaran per kapita Jakarta Selatan tahun 2025

### 2.3.1. Umur Panjang dan Hidup Sehat

Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diproksi dengan Angka Harapan Hidup saat lahir (*life expectancy at birth*). AHH dikenal dengan  $e_0$  merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu.

Idealnya Angka Harapan Hidup (AHH) dihitung berdasarkan Angka Kematian Menurut Umur (*Age Specific Death Rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat table kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau Mortpack. Data yang digunakan untuk menghitung AHH adalah data dari Sensus Penduduk 2010 serta Proyeksi Penduduk 2010-2035.

Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

Indeks kesehatan dihitung dengan rumus sebagai berikut.

**2.3.2. Pengetahuan**

Dimensi pengetahuan yang diproksi dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Kedua indicator tersebut dihitung dari data yang berasal dari Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS.

Harapan Lama Sekolah – HLS (*Expected Years of Schooling* – EYS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

HLS dihitung terhadap penduduk usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. Namun, ada kelemahan cara hitung ini yaitu tidak mencakup anak sekolah yang masuk SD pada usia 5 atau 6 tahun. HLS dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Keterangan:

- $HLS_a^t$  Harapan Lama Sekolah pada umur  $a$  di tahun  $t$
- $E_i^t$  Jumlah penduduk usia  $i$  yang bersekolah pada tahun  $t$
- $P_i^t$  Jumlah penduduk usia  $i$  pada tahun  $t$
- $i$  Usia ( $a, a + 1, \dots, n$ );  $a=7$
- $FK$  Faktor koreksi pesantren

Dengan faktor koreksi pesantren yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$FK = \frac{\text{Jumlah santri yang sekolah dan mukim}}{\text{Jumlah penduduk umur 7 tahun ke atas}} + 1$$

Rata-Rata Lama Sekolah – RLS (Mean Years of Schooling – MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang). Cakupan penduduk yang dihitung RLS adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas. Semakin tinggi angka RLS, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya. RLS digunakan untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal.

RLS dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$$

Keterangan:

RLS : Rata-rata lama sekolah di suatu wilayah

lama sekolah penduduk<sub>i</sub> : lama sekolah penduduk ke-i di suatu wilayah

n : jumlah penduduk (i = 1, 2, 3, ..., n)

Indeks pendidikan dihitung dari nilai indeks HLS dan RLS sebagai berikut.

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

### 2.3.3. Standar Hidup Layak

Dimensi standar hidup layak yang diproksi dengan PNB per kapita. Standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya kondisi ekonomi berikut pemerataannya. UNDP mengukur standar hidup layak menggunakan Produk Nasional Bruto (PNB) riil per kapita, sedangkan BPS dalam menghitung standar hidup layak menggunakan rata-rata pengeluaran per kapita riil. Rata-rata pengeluaran per kapita riil dihitung dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional-SUSENAS. Agar pengeluaran dapat dibandingkan antartahun, maka dalam penghitungan IPM metode baru, tahun yang digunakan sebagai rujukan adalah tahun 2012.

Indeks pengeluaran dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$I_{\text{pengeluaran}} = \frac{\ln(\text{pengeluaran}) - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}{\ln(\text{pengeluaran})_{\max} - \ln(\text{pengeluaran})_{\min}}$$

### 2.4. Kecepatan IPM

Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM digunakan ukuran pertumbuhan IPM. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antar capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai optimalnya.

Pertumbuhan IPM dihitung dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{Pertumbuhan IPM} = \frac{IPM_t - IPM_{t-1}}{IPM_{t-1}} \times 100\%$$

Keterangan:

$IPM_t$  : IPM di suatu wilayah pada tahun t

$IPM_{t-1}$  : IPM di suatu wilayah pada tahun t-1

### 2.5. Status IPM

Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok. Pengelompokan ini bertujuan untuk mengorganisasikan wilayah-wilayah menjadi kelompok-kelompok yang sama dalam hal pembangunan manusia.

1. Kelompok "sangat tinggi":  $IPM \geq 80$
2. Kelompok "tinggi":  $70 \leq IPM < 80$
3. Kelompok "sedang":  $60 \leq IPM < 70$
4. Kelompok "rendah":  $IPM < 60$

### 2.6. Manfaat IPM

#### Apa Saja Manfaat IPM?

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
- IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
- Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja Pemerintah, IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).



# BAB III

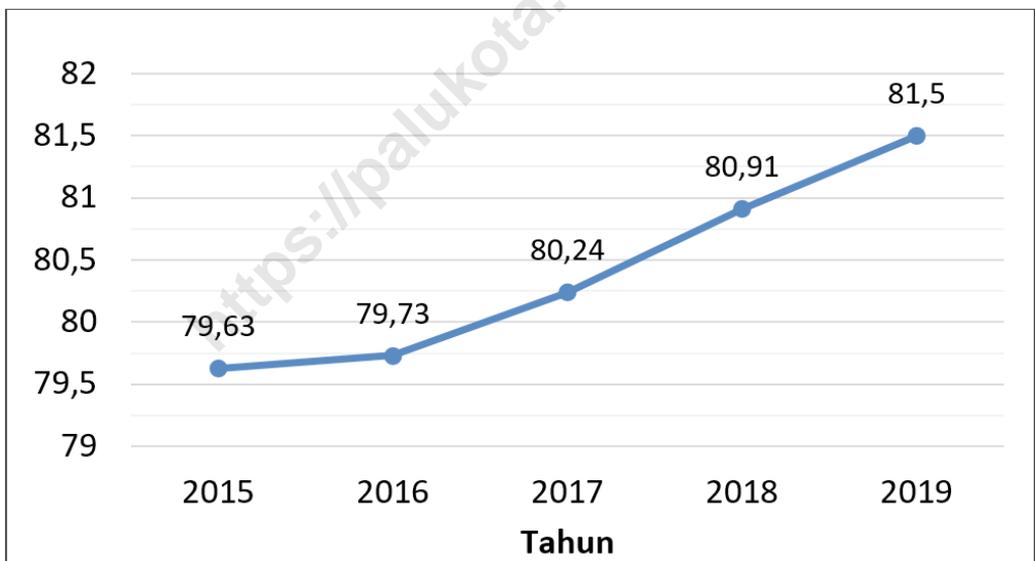
<https://paikadepa.bps.go.id>



## BAB III PEMBANGUNAN MANUSIA KOTA PALU

## 3.1. Indeks Pembangunan Manusia

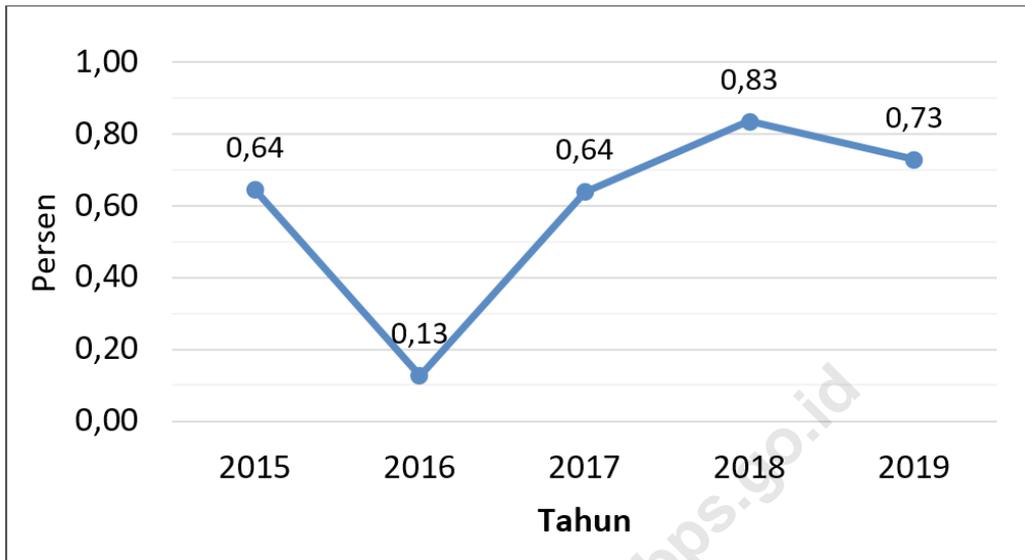
Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*) yang mengandung arti kebebasan diberikan kepada manusia untuk menentukan pilihan yang jauh lebih banyak sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang khususnya masalah yang menyangkut ekonomi. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



Gambar 3. IPM Kota Palu Tahun 2015-2019

Berdasarkan gambar diatas, terlihat bahwa pembangunan manusia di Kota Palu terus mengalami peningkatan mulai tahun 2015 hingga 2019. Pada tahun 2015 IPM Kota Palu mencapai 79,63 poin. Kemudian capaian IPM terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 menjadi 81,50 poin.

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Gambar 4. Kecepatan IPM Kota Palu Tahun 2015-2019

Kecepatan IPM menggambarkan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan manusia dalam suatu periode. Kecepatan IPM diukur dengan pertumbuhan IPM. Pertumbuhan yang bernilai positif menunjukkan bahwa IPM mengalami peningkatan dibandingkan dengan periode sebelumnya.

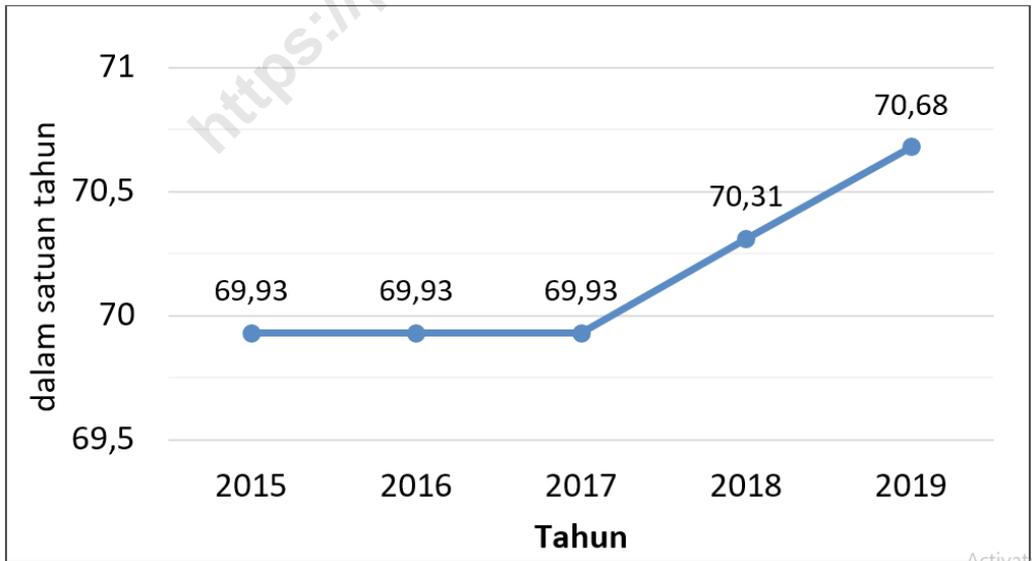
Pada tahun 2015 hingga 2019 IPM Kota Palu memiliki pertumbuhan yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa IPM Kota Palu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, pertumbuhan IPM Kota Palu sebesar 0,64 persen. Pada tahun berikutnya, pertumbuhan IPM mengalami perlambatan menjadi 0,13 persen. Kemudian pada dua tahun berikutnya pertumbuhan IPM mengalami peningkatan yaitu secara berturut-turut sebesar 0,64 persen dan 0,83 persen pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 pertumbuhan IPM kembali melambat menjadi 0,73 persen. IPM hanya mengalami perlambatan pertumbuhan, yang artinya IPM tetap meningkat dibandingkan periode sebelumnya.

Tabel 2. Status IPM Kota Palu Tahun 2015-2019

Tahun	Capaian IPM	Status IPM
2015	79,63	Tinggi
2016	79,73	Tinggi
2017	80,24	Sangat Tinggi
2018	80,91	Sangat Tinggi
2019	81,5	Sangat Tinggi

IPM dikelompokkan menjadi 4 kelompok untuk melihat status dari capaian IPM di suatu wilayah. Pada tahun 2015 hingga 2019, status IPM Kota Palu mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 hingga 2016 IPM Kota Palu berstatus tinggi. Sedangkan pada tahun berikutnya Status IPM Kota Palu meningkat menjadi sangat tinggi.

**3.2. Dimensi Kesehatan Kota Palu**



Gambar 5. Angka Harapan Hidup Kota Palu Tahun 2015-2019

Angka Harapan Hidup merupakan rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. Selama periode

2015 hingga 2017, Kota Palu telah memiliki Umur Harapan Hidup saat lahir yang stabil pada nilai 69,93 tahun. Pada dua tahun berikutnya, UHH Kota Palu meningkat menjadi 70,31 tahun pada tahun 2018 dan 70,68 tahun pada tahun 2019. UHH yang meningkat menunjukkan bahwa tingkat kesehatan di Kota Palu meningkat. Dengan kata lain, orang yang sehat akan memiliki umur yang panjang.

Capaian indikator kesehatan perlu ditingkatkan untuk membangun masyarakat yang sehat dan berumur panjang. Hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut adalah dengan memperbaiki/meningkatkan input di bidang kesehatan diantaranya adalah penyediaan jumlah tenaga medis (peningkatan rasio tenaga medis terhadap penduduk), penyediaan jumlah puskesmas/pustu (peningkatan rasio puskesmas terhadap penduduk), menyediakan pelayanan kesehatan murah & mudah, meningkatkan pengetahuan Ibu tentang pentingnya kesehatan, gizi, kesehatan ibu hamil, Penyediaan sarana sanitasi dan air bersih dan lain sebagainya.

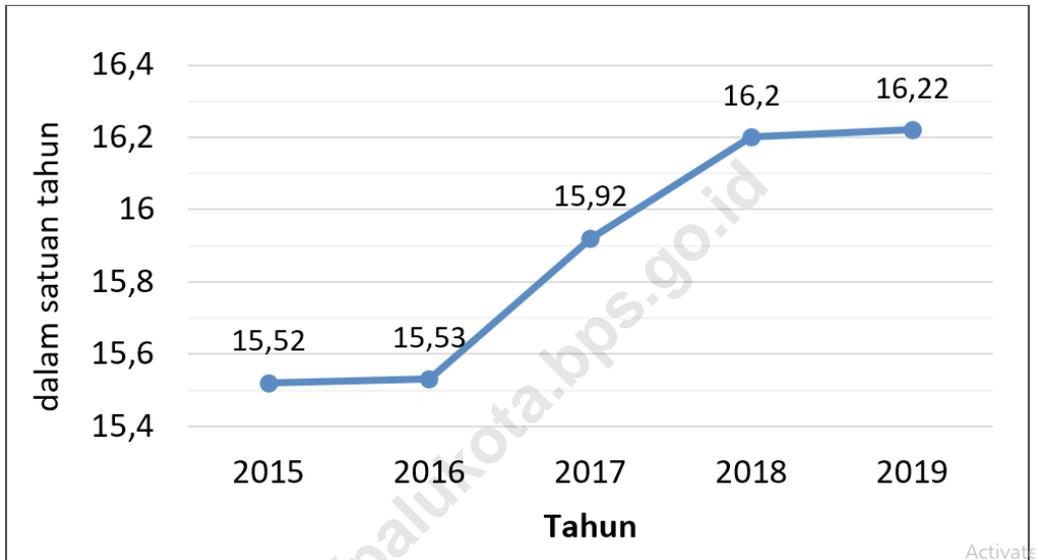
Sedangkan dari sisi proses dapat dilakukan dengan meningkatkan pemerataan sebaran tenaga medis, meningkatkan pemanfaatan fasilitas kesehatan, memudahkan keterjangkauan sarana/fasilitas kesehatan dan air bersih serta menyediakan program penunjang misalnya penyediaan infrastruktur jalan dan penerangan yang baik.

### **3.3. Dimensi Pendidikan Kota Palu**

Indikator pertama dalam dimensi pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS). Dari tahun ke tahun HLS Kota Palu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 HLS Kota Palu sebesar 15,52 tahun. Nilai tersebut berarti bahwa lamanya pendidikan yang diharapkan akan dirasakan adalah 15,52 tahun. Pada tahun berikutnya HLS tidak mengalami peningkatan yang signifikan,

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

yaitu menjadi 15,53 tahun. Dua tahun selanjutnya HLS Kota Palu mengalami peningkatan yaitu secara berturut turut sebesar 15,92 tahun dan 16,20 tahun pada tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2019 HLS Kota Palu cenderung stabil menjadi 16,22 tahun.

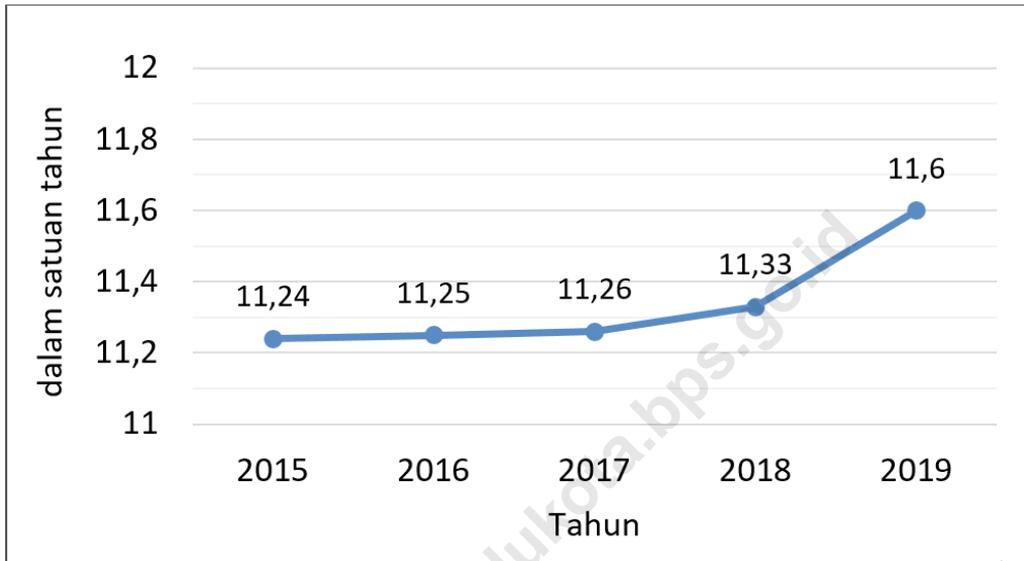


Gambar 6. Harapan Lama Sekolah Kota Palu Tahun 2015-2019

HLS yang terus mengalami peningkatan menunjukkan bahwa pembangunan sistem pendidikan di Kota Palu terus mengalami peningkatan. Pembangunan sistem pendidikan ini diharapkan dapat meningkatkan level pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di Kota Palu. Dengan pendidikan yang tinggi dapat meningkatkan kualitas manusia yang ada sehingga mereka dapat lebih produktif dan berdaya saing.

Indikator kedua dalam dimensi pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Pada tahun 2015 hingga tahun 2018 RLS Kota Palu memiliki nilai yang relatif stabil diantara 11,24 tahun hingga 11,33 tahun. Sedangkan pada tahun 2019 RLS meningkat menjadi 11,60 tahun. Nilai tersebut berarti bahwa rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk berusia di atas 25 tahun untuk bersekolah adalah 11,60 tahun. Nilai tersebut menggambarkan

kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal. Semakin tinggi RLS maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.



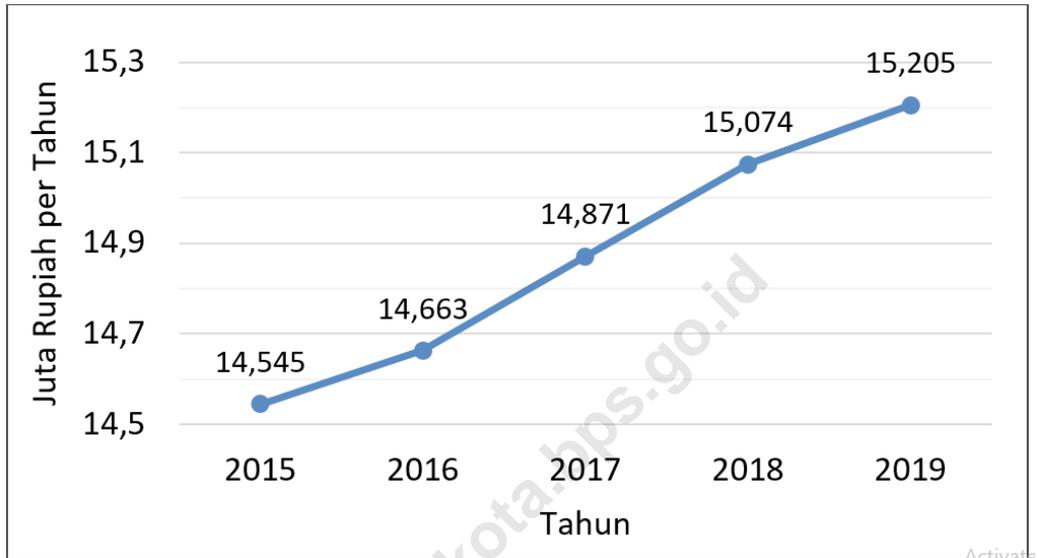
Gambar 7. Rata-rata Lama Sekolah Kota Palu Tahun 2015-2019

Capaian indikator pendidikan, termasuk HLS dan RLS, perlu terus ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan penduduk. Peningkatan capaian ini dapat dilakukan dengan berbagai upaya, dari segi input diantaranya dengan penyediaan guru dan penyediaan sarana & prasarana pendidikan. Sedangkan dari segi proses dilakukan dengan pemerataan penyebaran jumlah guru dan sarana pendukung pendidikan (misalnya jalan, alat transportasi, dll). Hal tersebut akan meningkatkan jumlah lulusan serta jumlah siswa yang melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

### 3.4. Dimensi Standar Hidup Kota Palu

Indikator yang digunakan dalam dimensi standar hidup layak pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Pengeluaran perkapita Kota Palu dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 pengeluaran

perkapita sebesar 14,545 juta rupiah per tahun. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 mencapai 15,205 juta rupiah per tahun.



Gambar 8. Pengeluaran Perkapita yang Disesuaikan Kota Palu Tahun 2015-2019

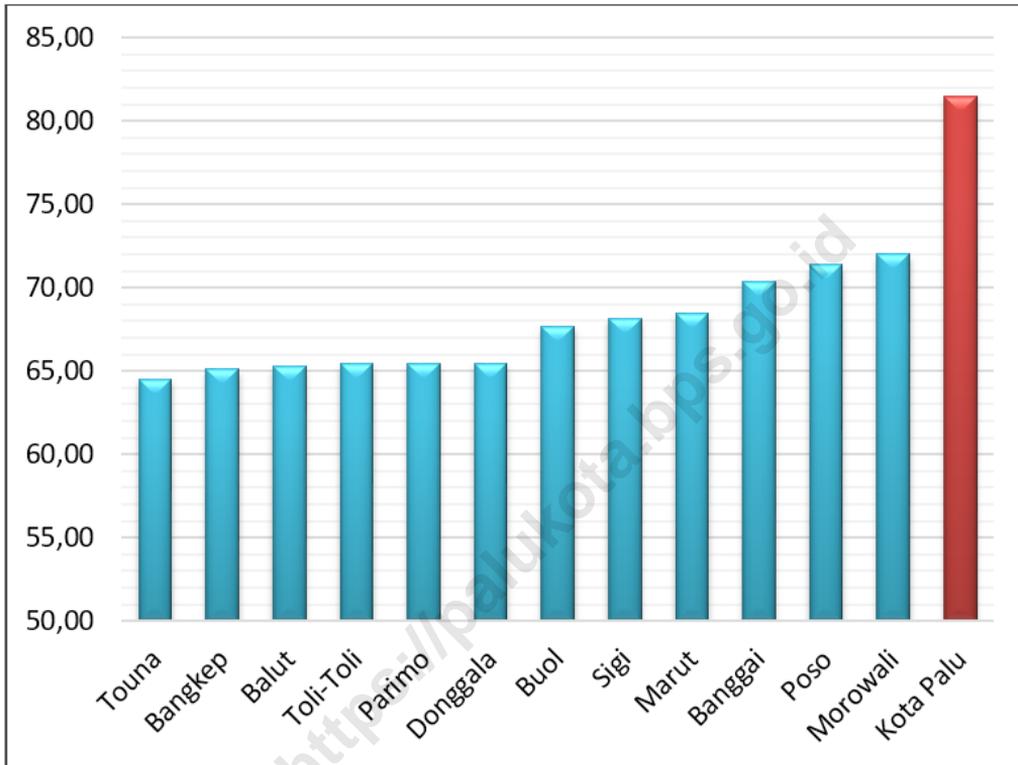
Pengeluaran ini dijadikan proksi bagi pendapatan. Peningkatan indikator ini dapat dilakukan dengan memperbaiki input dengan cara kredit usaha, pendidikan vokasi, regulasi kemudahan berusaha, dan program penciptaan lapangan kerja. Sedangkan dari sisi proses dilakukan dengan perbaikan sarana pendukung (infrastruktur, jalan, komunikasi, penerangan, dsb), kebijakan pengupahan dan pengendalian inflasi.

### 3.5. IPM Antarwilayah Di Sulawesi Tengah

Pada tahun 2019, pencapaian pembangunan manusia di tingkat Kabupaten/ Kota di Provinsi Sulawesi Tengah cukup bervariasi. Kota Palu memegang peranan sebagai pemegang IPM tertinggi se-Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai sebesar 81,50 poin. Angka tersebut jauh di atas angka IPM Sulawesi Tengah sebesar 69,50 poin. Hal tersebut tidak terlepas dari Kota Palu sebagai *leading sector* dalam indikator pengeluaran perkapita, rata-rata

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara usia harapan hidup Kota Palu berada pada peringkat ke dua setelah Kabupaten Poso dengan nilai 70,68 tahun.



Gambar 9. Perbandingan IPM Antarwilayah Di Sulawesi Tengah

Berdasarkan grafik di atas, sebagian besar Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah berada pada level IPM sedang. Sementara itu hanya Kabupaten Morowali dan Poso yang mempunyai berada pada level tinggi dan Kota Palu yang berada pada level sangat tinggi.



# BAB IV

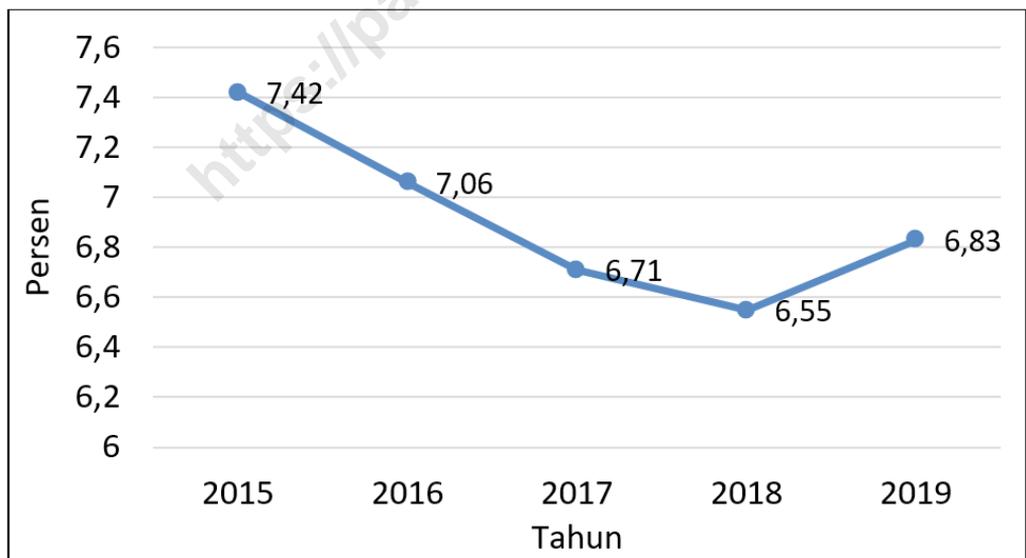
<https://paikadana.bps.go.id>



## BAB IV KAITAN IPM DENGAN INDIKATOR KEMISKINAN

## IPM dan Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi karena berkaitan dengan ketidakmampuan masyarakat untuk mengakses pemenuhan hak di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan partisipasi dalam masyarakat. Kemiskinan memiliki arti yang lebih luas dari sekedar lebih rendahnya tingkat pendapatan atau konsumsi seseorang dari standar kesejahteraan terukur seperti kebutuhan kalori minimum atau garis kemiskinan, akan tetapi kemiskinan memiliki arti yang lebih dalam karena berkaitan dengan ketidakmampuan untuk mencapai aspek di luar pendapatan (*non-income factors*) seperti akses kebutuhan minimum; kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi (Nurwati, 2008).

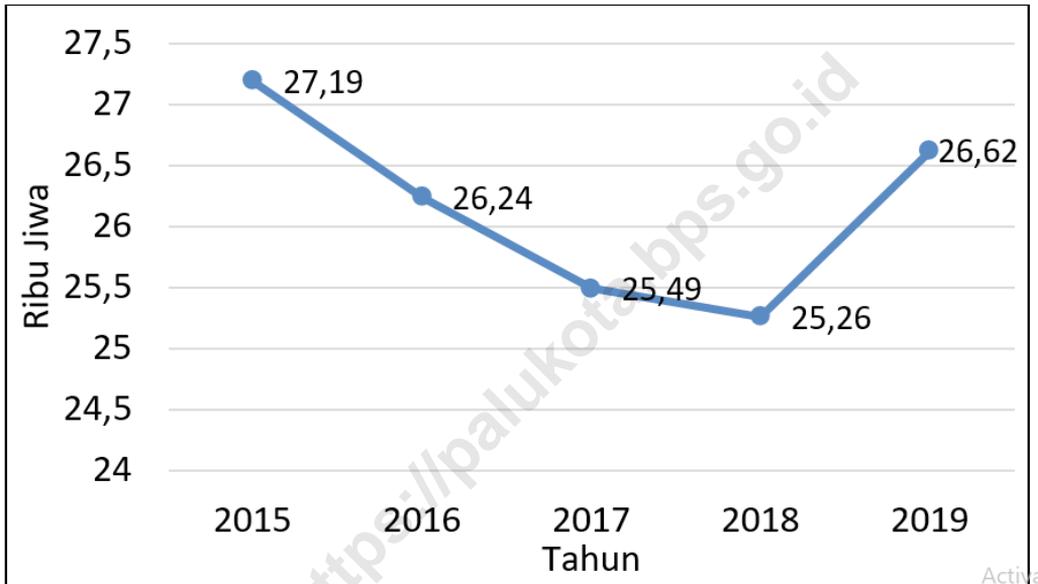


Gambar 10. Persentase Penduduk Miskin Kota Palu Tahun 2015-2019

Gambar diatas merupakan data persentase penduduk miskin di Kota Palu yang dihitung oleh BPS berdasarkan SUSENAS. Persentase penduduk miskin

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

merupakan persentase penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Berdasarkan gambar diatas persentase penduduk miskin pada tahun 2015 hingga 2018 mengalami penurunan. Persentase penduduk miskin pada tahun 2015 sebanyak 7,42 persen kemudian mengalami penurunan menjadi 6,55 persen pada tahun 2018. Namun pada tahun berikutnya persentase penduduk miskin meningkat menjadi 6,83 persen.



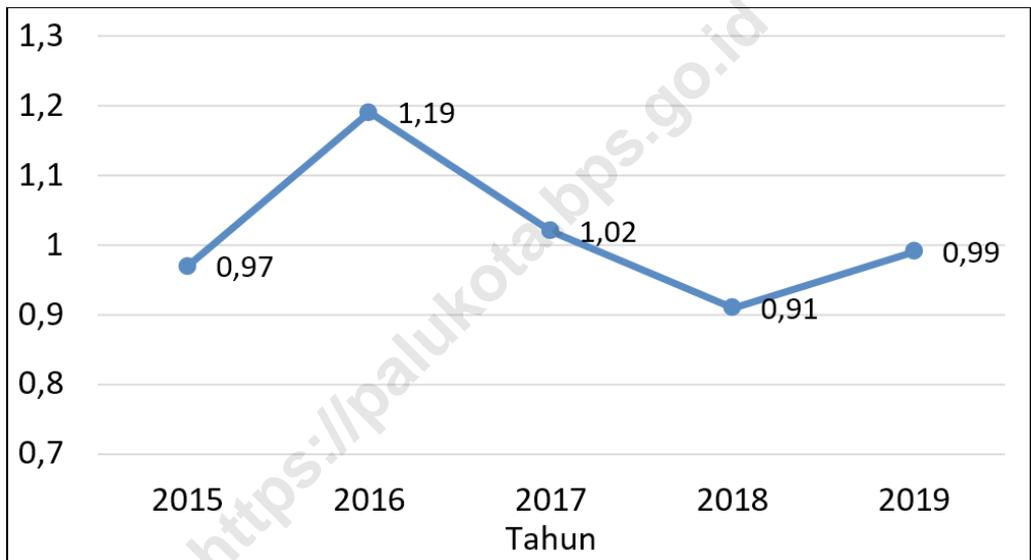
Gambar 11. Jumlah Penduduk Miskin Kota Palu 2015-2019

Gambar 11 merupakan data jumlah penduduk miskin di Kota Palu yang dihitung oleh BPS berdasarkan SUSENAS. Jumlah penduduk miskin merupakan jumlah penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan (GK). Jumlah penduduk miskin di Kota Palu memiliki pola yang sama dengan persentase penduduk miskin. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2015 sebanyak 27,19 ribu jiwa kemudian mengalami penurunan menjadi 25,26 ribu jiwa pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,62 ribu jiwa.

Pada gambar 12 di bawah ini menampilkan data indeks kedalaman kemiskinan di Kota Palu. Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap*

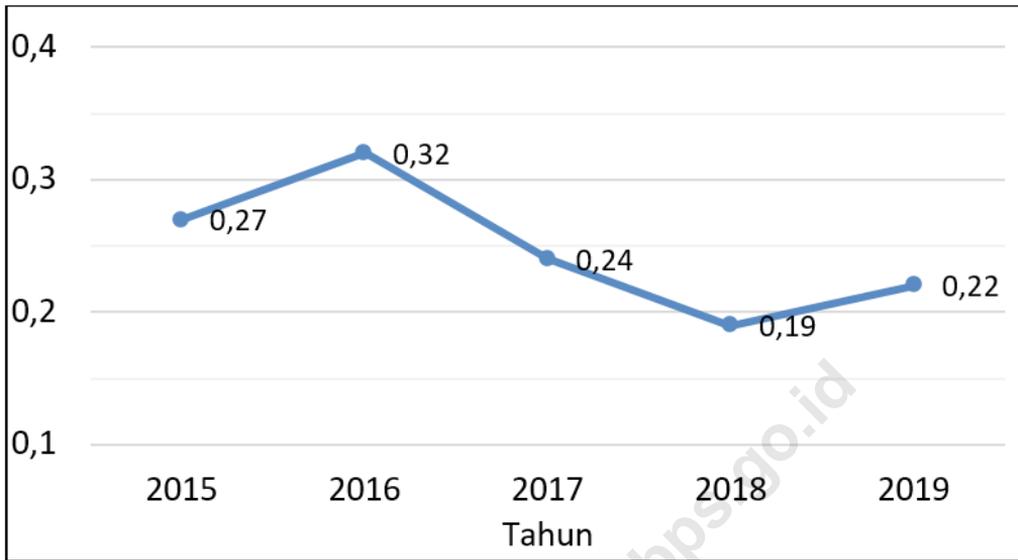
## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

*Index-P1*), merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Pada tahun 2015 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,97 dan meningkat menjadi 1,19 pada tahun 2016. Kemudian menurun menjadi 0,91 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 indeks kedalaman kemiskinan sebesar 0,99.



Gambar 12. Kedalaman Kemiskinan Kota Palu Tahun 2015-2019

Sedangkan gambar 13 merupakan data indeks keparahan kemiskinan di Kota Palu. Indeks Keparahhan Kemiskinan (*Proverty Severity Index-P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Indeks keparahan kemiskinan memiliki pola yang sama dengan indeks kedalaman kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan tertinggi terjadi pada tahun 2016 sebesar 0,32. Sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2018 sebesar 2018. Kemudian meningkat pada tahun 2019 menjadi 0,22.



Gambar 13. Keperahan Kemiskinan Kota Palu Tahun 2015-2019

Subandi (2012) dalam Ariwuni dan Kartika (2019) menyatakan salah satu strategi/upaya pengentasan kemiskinan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Pembangunan SDM dapat dilakukan dengan perbaikan akses terhadap konsumsi pelayanan sosial (pendidikan, kesehatan dan gizi) merupakan strategi pemerintah untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut Komite Penanggulangan Kemiskinan disebutkan bahwa kemiskinan salah satunya disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia, yaitu banyaknya rumah tangga yang tidak memiliki aset, terbatasnya alternatif lapangan kerja, degradasi sumber daya alam dan lingkungan hidup, lemahnya kelembagaan dan organisasi masyarakat, dan masih kurangnya prasarana dan sarana dasar.

Tabel 3 berikut ini menunjukkan nilai korelasi antara IPM dengan beberapa indikator kemiskinan di Kota Palu dengan menggunakan data 10 tahun terakhir.

Tabel 3. Korelasi IPM dengan Indikator Kemiskinan

	Korelasi dengan IPM	
	Persentase penduduk miskin	-0,85
Jumlah penduduk miskin	-0,76	Kuat
Kedalaman kemiskinan P1	-0,74	Kuat
Keparahan kemiskinan P2	-0,66	Kuat

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa terdapat keterkaitan antara kemiskinan dan pembangunan manusia. Berdasarkan Tabel 3 terlihat bahwa IPM dan indikator kemiskinan memiliki korelasi kuat dan negatif. Peningkatan nilai IPM akan membuat kemiskinan menurun. Sehingga program pengentasan kemiskinan salah satunya dapat dilakukan dengan meningkatkan nilai IPM. Dengan IPM yang tinggi kualitas manusia akan meningkat sehingga mereka akan memiliki kemampuan yang tinggi untuk lebih produktif dan keluar dari kemiskinan.





# BAB V

<https://pangkajene.bps.go.id>



## BAB V PENUTUP

Manusia merupakan tujuan dari sebuah pembangunan. Pembangunan manusia diukur dengan IPM (Indeks Pembangunan Manusia). IPM merupakan indeks komposit yang menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

1. Sejak tahun 2015, IPM Kota Palu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015 IPM Kota Palu mencapai 79,63 dengan status tinggi dan terus meningkat hingga mencapai 81,50 dengan status sangat tinggi pada tahun 2019.
2. IPM dibentuk dari 3 dimensi yaitu umur panjang dan hidup sehat, pendidikan, serta status hidup layak. Nilai dari seluruh indikator yang mewakili ketiga dimensi tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 hingga 2019. Angka harapan hidup meningkat dari 69,93 tahun di tahun 2015 menjadi 70,68 tahun di tahun 2019. Sedangkan harapan lama sekolah meningkat dari 15,52 tahun menjadi 16,22 tahun. Rata-rata Lama Sekolah meningkat dari 11,24 tahun di tahun 2015 menjadi 11,60 tahun di tahun 2019. Kemudian indikator keempat yaitu pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan meningkat dari 14,545 juta rupiah per tahun di tahun 2015 menjadi 15,205 juta rupiah per tahun di tahun 2019.
3. Kota Palu memiliki capaian IPM tertinggi se-Provinsi Sulawesi Tengah dengan nilai sebesar 81,50 poin. Hal tersebut disebabkan karena Kota Palu adalah *leading sector* dalam indikator pengeluaran per kapita, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Sementara usia harapan hidup Kota Palu berada pada peringkat ke dua setelah Kabupaten Poso dengan nilai 70,68 tahun.

4. Kemiskinan salah satunya disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia. Kemiskinan memiliki korelasi negatif yang kuat dengan IPM. Sehingga salah satu cara untuk mengatai kemiskinan adalah dengan memperbaiki kualitas manusia atau dengan kata lain dengan meningkatkan IPM.

<https://palukota.bps.go.id>



# DAFTAR PUSTAKA

<http://pustaka.bps.go.id>



## DAFTAR PUSTAKA

Ariwuni, Made Ade Dwi dan Kartika, I Nengah. 2019. *Pengaruh PDRB Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap IPM Dan Tingkat Kemiskinan Di Kabupaten/ Kota Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana, Vol.8.No.12 Desember 2019.

Badan Pusat Statistik. 2016. *Panduan Penghitungan Indeks Pembangunan Metode Baru, Edisi 1*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. 2020. *Indeks Pembangunan Manusia 2019*. Jakarta : Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik. *Indeks Pembangunan Manusia*. 18 September 2020. <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab1>

Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat. 2018. *Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Raja Ampat 2017*. Raja Ampat : Badan Pusat Statistik Kabupaten Raja Ampat.

Badan Pusat Statistik Kota Palu. 2020. *BRS Indeks Pembangunan Manusia Kota Palu 2019*. Palu : Badan Pusat Statistik Kota Palu.

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat. *Indeks Pembangunan Manusia*. 22 September 2020. <https://sulbar.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html#subjekViewTab3.html>

Kementrian PPN/Bappenas. 2020. *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024*. Jakarta : Kementrian PPN/Bappenas.

Nurwati, Nunung. 2008. *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. Jurnal Kependudukan Padjadjaran, Vol. 10, No. 1, Januari 2008 : 1 - 11

UNDP. *Human Development Index (HDI)*. 17 September 2020. <http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi>

<https://palukota.bps.go.id>



**LAMPIRAN**

<https://paudpaud.bps.go.id>



## IPM

menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.



IPM KOTA PALU  
TAHUN 2019  
**81,50**

# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

**70,68**  
TAHUN



## ANGKA HARAPAN HIDUP

rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi baru lahir pada tahun tertentu



**16,22** TAHUN

## HARAPAN LAMA SEKOLAH

lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang

jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal

## RATA-RATA LAMA SEKOLAH

**11,60** TAHUN



## PENGELUARAN PERKAPITA RIIL

BPS memproksi standar hidup layak dengan rata-rata pengeluaran per kapita riil



**15,205**  
JUTA RUPIAH  
PER TAHUN





## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Lampiran 1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019

Kode	Kabupaten /Kota	IPM		Rangking IPM		Pertumbuhan IPM
		2018	2019	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>7200</b>	SULAWESI TENGAH	68,88	69,50	25	25	0,90%
<b>7201</b>	Banggai Kepulauan	64,68	65,13	11	12	0,70%
<b>7202</b>	Banggai	69,85	70,36	4	4	0,73%
<b>7203</b>	Morowali	71,14	72,02	2	2	1,24%
<b>7204</b>	Poso	70,68	71,40	3	3	1,02%
<b>7205</b>	Donggala	65,14	65,49	8	8	0,54%
<b>7206</b>	Toli-Toli	64,60	65,42	12	10	1,27%
<b>7207</b>	Buol	67,30	67,69	7	7	0,58%
<b>7208</b>	Parigi Moutong	64,85	65,47	9	9	0,96%
<b>7209</b>	Tojo Una-Una	63,38	64,52	13	13	1,80%
<b>7210</b>	Sigi	67,66	68,16	6	6	0,74%
<b>7211</b>	Banggai Laut	64,80	65,27	10	11	0,73%
<b>7212</b>	Morowali Utara	67,95	68,45	5	5	0,74%
<b>7271</b>	Kota Palu	80,91	81,50	1	1	0,73%

## INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Lampiran 2. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Sulawesi Tengah Menurut Kabupaten/Kota, 2018-2019

Kode	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita (juta rupiah/tahun)	
	2018	2019	2018	2019	2018	2019	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
<b>7200</b>	67,78	68,23	13,13	13,14	8,52	8,75	9.488	9.604
<b>7201</b>	65,12	65,71	13,04	13,05	8,14	8,19	7.545	7.619
<b>7202</b>	70,32	70,61	13,22	13,23	8,06	8,24	9.712	9.842
<b>7203</b>	68,45	68,82	12,89	13,33	8,98	9,11	11.159	11.277
<b>7204</b>	70,51	70,85	13,68	13,69	9,04	9,36	8.936	9.084
<b>7205</b>	66,37	66,85	12,47	12,48	7,85	7,86	8.106	8.189
<b>7206</b>	64,71	65,30	12,71	12,72	7,96	8,26	8.017	8.156
<b>7207</b>	67,59	68,17	13,07	13,08	8,74	8,75	8.079	8.151
<b>7208</b>	63,57	63,94	12,45	12,46	7,18	7,47	9.808	9.878
<b>7209</b>	64,61	65,14	11,82	12,25	8,16	8,38	7.608	7.765
<b>7210</b>	69,15	69,57	12,85	12,86	8,43	8,53	8.236	8.375
<b>7211</b>	64,21	64,79	12,88	12,89	8,44	8,51	7.810	7.888
<b>7212</b>	68,77	69,19	12,22	12,23	8,58	8,70	8.985	9.109
<b>7271</b>	70,31	70,68	16,20	16,22	11,33	11,60	15.074	15.205





Sensus  
Penduduk  
2020

#MencatatIndonesia

# DATA MENCERDASKAN BANGSA

<http://palukota.bps.go.id>



**Badan Pusat Statistik**  
**Kota Palu**

Jl. Baruga No. 19 Palu-Sulawesi Tengah 94234

Telp. (62-451) 422066,

Mailbox : bps7271@bps.go.id

Website : palukota.bps.go.id